IKM KOTA KENDARI DIDORONG "NAIK KELAS", PEMKOT GELAR BIMTEK DAN SERTIFIKASI TKDN BAGI PELAKU INDUSTRI LOKAL

Sumber gambar:
kendarikota.go.id

Isi Berita:

Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari terus mendorong pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai penopang utama perekonomian lokal. Hal ini ditandai dengan digelarnya kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi para pelaku IKM se-Kota Kendari, yang dilaksanakan di Hotel Zahra, Rabu (25/6/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman. Dalam sambutannya, Sudirman menegaskan bahwa IKM memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian nasional. Data menunjukkan bahwa sektor IKM menyumbang 3,56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, berkontribusi 21,1% dari total output industri, dan menjadi penyerap tenaga kerja formal dan informal dalam jumlah signifikan. "Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, IKM justru menjadi penopang fundamental perekonomian. Mereka tidak hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga menciptakan produk-produk unggulan yang berdaya saing," ujarnya di hadapan puluhan pelaku IKM yang hadir.

Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa, Pemerintah Kota Kendari menargetkan IKM dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Melalui program-program strategis, Pemkot berharap pertumbuhan IKM dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) hingga ke wilayah sekitar Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kendari dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, dan Maritim

(BBIHPMM) Regional Makassar. Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi TKDN bagi produk-produk IKM di Kendari.

Hingga saat ini, sebanyak 166 sertifikat TKDN diusulkan untuk IKM yang bergerak di sektor pangan, kerajinan, olahan batako, dan meubel. Dari jumlah tersebut, 144 sertifikat telah terbit hingga 2024, melampaui target awal sebesar 125 sertifikat. Sertifikasi TKDN sangat penting karena membuka peluang produk IKM masuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, pelaku IKM berpeluang mendapatkan insentif fiskal seperti bantuan alat, permodalan, hingga potongan pajak. "Melalui sertifikasi TKDN, kita ingin produk IKM Kendari tidak hanya bersaing di pasar lokal, tapi juga bisa menembus pasar nasional bahkan ekspor. Ini bagian dari langkah nyata mewujudkan program IKM Naik Kelas," kata wawali.

Berbagai tantangan yang dihadapi IKM seperti akses pembiayaan, teknologi, pemasaran, bahan baku, hingga kualitas SDM pun menjadi perhatian pemerintah. Pemkot telah mengembangkan infrastruktur sentra industri meubeler dan olahan pangan, menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis, serta memfasilitasi promosi produk dalam berbagai pameran berskala lokal hingga nasional. Lebih lanjut, pemerintah juga memfasilitasi kunjungan studi pelaku IKM ke sentra industri maju di Jawa, Bali, dan Makassar untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk mereka.

"Semua ini kami lakukan agar pelaku IKM di Kota Kendari bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Kami ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung IKM sebagai penggerak ekonomi lokal," tegasnya. Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku IKM yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut serta mitra kerja BBIHPMM Regional Makassar. Ia berharap pembinaan dan sertifikasi ini benar-benar menjadi pintu masuk bagi IKM Kendari untuk menembus pasar lebih luas. (AL)

Sumber Berita:

1. https://berita.kendarikota.go.id/ikm-kota-kendari-didorong-naik-kelas-pemkot-gelar-bimtek-dan-sertifikasi-tkdn-bagi-pelaku-industri-lokal/, "IKM Kota Kendari Didorong "Naik Kelas", Pemkot Gelar Bimtek dan Sertifikasi TKDN bagi Pelaku Industri Lokal", tanggal 25 Juni 2025.
2. https://edisiindonesia.id/2025/06/25/dorong-ikm-naik-kelas-pemkot-kendari-gelar-bimtek-dan-sertifikasi-tkdn-bagi-pelaku-industri-lokal/, "Dorong IKM Naik Kelas, Pemkot Kendari Gelar Bimtek dan Sertifikasi TKDN bagi Pelaku Industri Lokal", tanggal 25 Juni 2025.

Catatan:

- Sertifikat TKDN diperlukan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD. TKDN menunjukkan persentase

kandungan local (komponen dan bahan baku) dalam suatu produk. Kebijakan TKDN mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta meningkatkan pemberdayaa industri dalam negeri.

- Terkait hal di atas diatur diatur pada:

  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

  1. Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional;
  2. Pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  3. Pasal 66 ayat (3a) menyatakan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.